

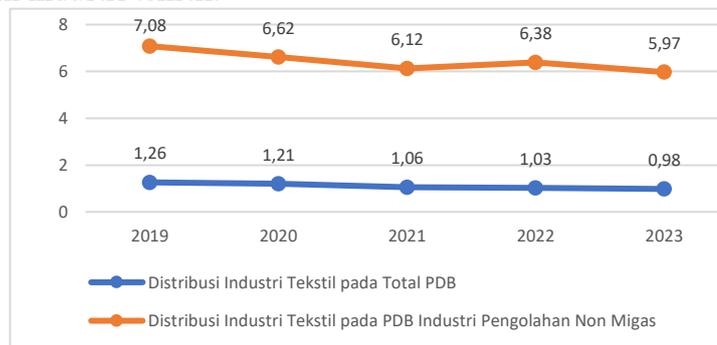
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. (Rusastra, 2017). Di antara berbagai sektor industri, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Hanasri et al., 2024). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang menyatakan bahwa industri tekstil termasuk dalam kelompok industri prioritas dan dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan yang strategis.

Meskipun secara normatif telah ditetapkan sebagai sektor prioritas, kenyataannya industri ini belum sepenuhnya terbebas dari berbagai tekanan. Data pada gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan bahwa kontribusi industri tekstil terhadap PDB sektor manufaktur non-migas mengalami penurunan dari 7,08% pada tahun 2019 menjadi 5,97% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi pengembangan yang terarah dan adaptif bagi keberlangsungan industri tekstil.



Gambar 1. 1 Distribusi Industri Tekstil pada Total PDB dan PDB Industri Pengolahan Non Migas

Sumber: Badan Pusat Statistika (Diolah oleh Peneliti)

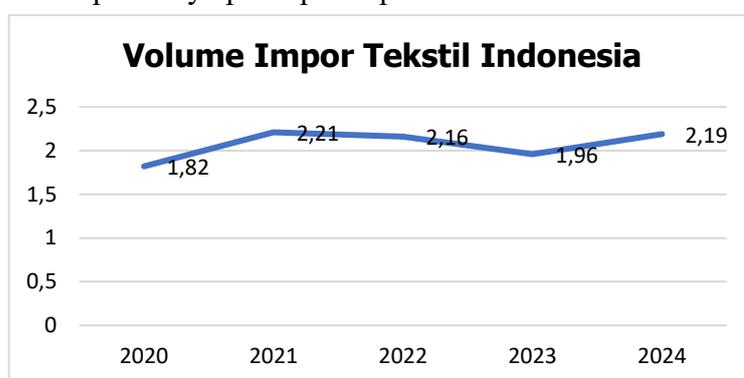
Situasi ini juga tercermin di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri tekstil terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sepanjang awal tahun 2024, tercatat sebanyak 30 industri TPT berhenti beroperasi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 3.600 tenaga kerja di wilayah sentra industri tekstil Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung (Laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2024).

Penurunan aktivitas industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan paling signifikan datang dari sisi eksternal, yaitu persaingan global yang semakin tajam dengan negara produsen TPT asing lainnya seperti China, India, dan Vietnam. Negara-negara tersebut memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan dapat memproduksi produk tekstil dengan harga yang lebih murah dibandingkan Indonesia (Luthfianty, 2011).

Masuknya produk impor dalam jumlah besar turut memperburuk kondisi industri tekstil lokal. Hal ini dipicu oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memberikan kemudahan terhadap arus masuk barang impor, termasuk produk sandang. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya volume impor tekstil ke pasar domestik, yang umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan (HPP) produk dalam negeri (Wirawasta, 2024). Situasi ini menyebabkan produk lokal, khususnya yang dihasilkan oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bandung, mengalami tekanan daya saing yang signifikan baik dari sisi harga maupun permintaan pasar.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disajikan dalam gambar 1.2 di bawah ini, tren peningkatan impor tekstil semakin terlihat sepanjang tahun 2024. Tercatat, Indonesia mengimpor 2,19 juta ton produk tekstil dengan nilai mencapai US\$8,94 miliar, meningkat sekitar 12% secara volume dan 7% secara nilai dibandingkan

tahun sebelumnya. Produk-produk yang diimpor sangat beragam, mulai dari sutra, wol, filamen, kapas, serat tekstil, kain tenun, kain rajutan, hingga pakaian jadi dan pakaian bekas. Data ini hanya mencakup impor resmi yang tercatat secara legal, belum termasuk impor ilegal yang juga banyak beredar di pasar dan memberi tekanan tambahan terhadap industri dalam negeri. Hal ini pun mengakibatkan perubahan preferensi konsumen dalam negeri karena masyarakat cenderung memilih produk impor yang lebih murah dan bervariasi, apalagi dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.



Gambar 1. 2 Volume Impor Tekstil Indonesia 2020-2024

Sumber: BPS, Kemenperin (Diolah Peneliti)

Selain tekanan dari sisi eksternal, tantangan internal juga turut memperburuk kondisi industri tekstil di Kabupaten Bandung, terutama terkait dengan menurunnya kapasitas produksi. Menurut David, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indoensia Jawa Barat (API) banyak industri tekstil di Kabupaten Bandung mengalami penurunan produksi signifikan hingga di bawah 50% kapasitas (Wirawasta, 2024). Salah satu penyebab utamanya adalah masih digunakannya mesin-mesin produksi yang sudah berusia tua dan tidak lagi efisien (Firdaus, 2023).

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, seperti kapas. Tingginya ketergantungan terhadap kapas impor tak lepas dari rendahnya kapasitas produksi dalam negeri yang hanya mampu memenuhi sekitar 0,1% hingga 2,3% dari total kebutuhan nasional, sementara sisanya harus dipenuhi melalui impor (Rusastra, 2017). Minimnya produksi kapas domestik ini dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan pertanian, cuaca yang tidak menentu, serta kecenderungan petani yang

lebih memilih menanam komoditas pangan lain yang dinilai lebih menguntungkan dalam jangka pendek (Aulia, 2014).

Situasi ini menegaskan perlunya dukungan konkret dari pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri tekstil. Oleh karena itu, pengembangan industri tekstil tidak bisa lagi hanya berfokus pada pemulihan jangka pendek, melainkan harus diarahkan pada transformasi menyeluruh agar industri ini menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis, khususnya dalam menyediakan pelatihan bagi pelaku industri, memperkuat kapasitas produksi, serta menjembatani hubungan antara produsen lokal dan pasar yang lebih luas. Langkah-langkah tersebut menjadi sangat penting, mengingat sektor industri, terutama di negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya beli masyarakat (Firdaus, 2023).

Dasar hukum dari upaya ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menetapkan bahwa pembangunan industri harus berorientasi pada daya saing, keberlanjutan, dan pengoptimalan sumber daya lokal. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang memuat terkait perencanaan pembangunan dan pengembangan industri tekstil.

Berdasarkan peraturan RIPIN, terdapat berbagai program prioritas untuk sektor tekstil pada periode 2020–2035, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kualitas produk, dan keberlanjutan industri. Tabel 1.1 menunjukkan rincian program tersebut yang digunakan sebagai andasan strategis bagi pengembangan industri tekstil di Indonesia, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah

dan pelaku industri dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, inovasi, dan keberlanjutan industri.

Tabel 1. 1 Program Pengembangan Industri Prioritas (Tekstil) Periode 2020-2035

Tahun Periode	Program Pengembangan
2020-2035	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 2. Meningkatkan kualitas produk serat sintetik dari sumber bahan baku terbarukan untuk mendukung industri tekstil khusus 3. Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri; 4. Mengembangkan produk serat khusus (antara lain <i>high tenacity dan micro fiber</i>); 5. Melakukan diversifikasi produk benang untuk benang-benang khusus; 6. Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil; 7. Memfasilitasi pengembangan lanjut standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual design produk tekstil; 8. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola program industri secara efektif. Di tingkat daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menjadi landasan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat untuk menjalankan peran strategis dalam mendukung sektor industri, termasuk tekstil.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat, sebagai institusi yang bertanggung jawab, memiliki perencanaan strategis yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Jawa Barat Tahun 2024–2026. Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi, termasuk penguatan sektor industri yang menjadi prioritas daerah. Dalam Renstra tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menekankan peningkatan daya saing industri lokal, keberlanjutan ekonomi, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal.



Gambar 1. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar

Sumber: Rencana Startegis Disperindag Jabar 2024-2026

Strategi di atas merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi

menjadi payung dalam menetapkan arah kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi panduan dalam merumuskan atau menentukan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada gambar di atas strategi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada penguatan sentra industri tekstil, pengembangan IKM, transformasi industri hijau, peningkatan daya saing, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat penelitian yang menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam menangani industri tekstil di Kabupaten Bandung. Penelitian oleh (Firdaus, 2023) mengungkapkan bahwa strategi yang belum optimal disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan lokasi strategis dan infrastruktur daerah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara menyeluruh dimensi strategi publik, seperti arah kebijakan, tujuan strategis, pola tindakan, serta proses pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan strategi publik dari (Mulgan, 2009) untuk menganalisis strategi pengembangan industri tekstil secara lebih komprehensif.

Novelty penelitian ini terletak pada pengadopsian teori strategi publik yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) yang mencakup dimensi *purpose*, *environment*, *direction*, *action*, dan *learning* untuk mengetahui strategi yang diterapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di wilayah sentra tekstil Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian menelusuri bagaimana strategi dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara institusional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kajian yang terfokus pada industri tekstil di Kabupaten Bandung memberikan kontribusi spesifik terhadap pemahaman dinamika industri padat karya di daerah sentra industri utama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa pelaksanaan strategi pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung masih belum berjalan secara optimal. Dugaan ini muncul karena beberapa indikator strategi publik belum

tercapai secara maksimal, khususnya pada dimensi *environment* (lingkungan), *direction* (arahan), dan *action* (tindakan). Pada dimensi *environment*, masih terdapat berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti preferensi masyarakat terhadap produk impor, penggunaan mesin-mesin tua, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor yang berdampak pada lambatnya proses produksi.

Pada dimensi *direction*, terdapat keterbatasan wewenang dalam lingkup tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang hanya bersifat mendukung peningkatan produksi, namun tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan pusat, terutama terkait regulasi impor. Sementara itu, pada dimensi *action*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dinilai belum mampu mengatasi penurunan produksi secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengembangan yang efektif, menggunakan kerangka teori Strategi Publik oleh (Mulgan, 2009) yang terdiri dari 5 indikator diantaranya: *purpose* (tujuan), *environment* (lingkungan), *direction* (arahan), *action* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran). Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian berfokus pada bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, dapat menciptakan strategi yang berkelanjutan, dan terukur. Dengan demikian, peneliti mengambil judul **“Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam Pengembangan Industri Tekstil di Kabupaten Bandung.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Penurunan kontribusi industri tekstil terhadap PDB sektor manufaktur non-migas, dari 7,08% pada tahun 2019 menjadi 5,97% pada tahun 2023, menunjukkan tekanan besar yang dihadapi oleh sektor ini secara nasional.
2. Tingginya jumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berhenti beroperasi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, yang

berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan tenaga kerja.

3. Rendahnya daya saing industri tekstil di Kabupaten Bandung, terutama dalam pasar ekspor, akibat tertinggalnya efisiensi produksi dibanding negara-negara pesaing seperti China, Vietnam, dan India.
4. Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor dan penggunaan mesin produksi yang sudah usang, yang berdampak pada menurunnya efisiensi dan produktivitas pelaku industri tekstil, khususnya skala IKM.
5. Meningkatnya volume dan nilai impor produk tekstil, terutama pasca diberlakukannya Permendag 8 Tahun 2024, yang memperparah persaingan bagi industri tekstil dalam negeri.
6. Ketidaksesuaian antara strategi daerah dengan kebijakan pusat, khususnya terkait regulasi impor yang justru merugikan industri lokal dan sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah karena keterbatasan wewenang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan di latar belakang, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan utama yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana lingkungan yang terjadi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana arah strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana tindakan konkret yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung?

5. Bagaimana pembelajaran strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Target dari sebuah penelitian tercantum didalam tujuannya itu sendiri yang mana dijadikan sebuah standar perkiraan dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. Dari beberapa masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tujuan strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi lingkungan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan arahan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindakan strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran dari strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam bidang strategi publik yang membahas isu

pengembangan industri tekstil, khususnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam mendukung pengembangan daya saing industri tekstil tenun lokal.

1. Manfaat Teoretis

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas strategi pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini yang mengadopsi pendekatan strategi publik dan dilakukan dengan dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang strategi pemerintah. Penelitian ini menyoroti analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, serta implementasi langkah-langkah strategis untuk pengembangan sektor industri tekstil. Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti berupaya mendalami teori-teori strategi publik dan administrasi publik, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan pemikiran baru yang relevan dengan literatur di kedua bidang kajian tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena yang dihadapi industri tekstil di Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memberikan pandangannya dalam argumentasi yang tercantum dalam penelitian ini

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan lembaga pemerintah lainnya dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan industri tekstil. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu lembaga pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan meningkatkan keberlanjutan industri lokal.

c. Bagi Pelaku Industri Tekstil

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai strategi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan industri tekstil, sehingga pelaku industri dapat memanfaatkannya untuk menyusun langkah strategis, menjalin kemitraan, dan meningkatkan produktivitas usaha.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal dan partisipasi aktif dalam upaya pengembangan industri tekstil. Dengan meningkatnya dukungan dari masyarakat, industri tekstil di Kabupaten Bandung dapat berkembang lebih baik, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan lokal.

F. Kerangka Berpikir

Pada kerangka pemikiran, penelitian ini dirancang sebagai landasan berpikir sistematis yang menjadi acuan dalam menangani permasalahan yang dibahas. Penelitian ini membahas strategi pengembangan industri tekstil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung.

Upaya pengembangan ini mencakup berbagai langkah strategis untuk memperkuat kembali kemampuan produksi dan inovasi industri tekstil yang selama ini mengalami tantangan, seperti penurunan produktivitas, kurangnya inovasi teknologi, dan minimnya akses pasar. Pengembangan industri juga menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yang mencakup:

1. Pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha.
2. Penguasaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

3. Perluasan akses pasar domestik dan internasional.
4. Penguatan daya saing IKM melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan.

Pengembangan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan daya saing suatu sektor atau industri agar dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian dan masyarakat (Rusastra, 2017) Pengembangan industri tekstil di Kabupaten Bandung tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi industri, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing di pasar global. (Daulay & Nurhayati, 2024) menyebutkan bahwa daya saing dipengaruhi oleh kemampuan inovasi, efisiensi produksi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran penting sebagai fasilitator kebijakan dan pemberi insentif untuk mendukung keberlanjutan industri kecil dan menengah.

Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit serta Tata Kerja. Tugas tersebut mencakup melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, yang meliputi industri agro, kimia, tekstil, dan aneka, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

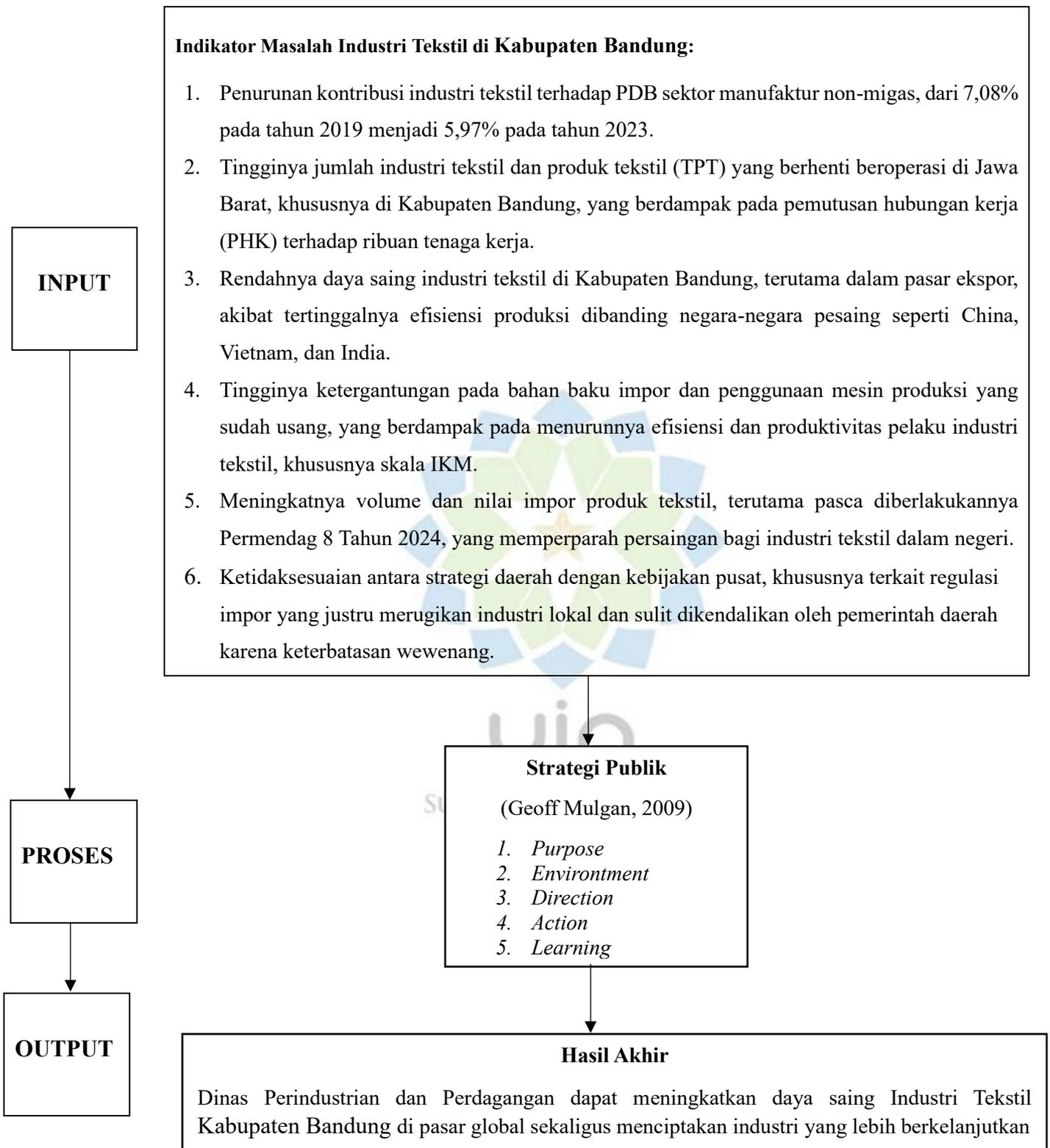
Tantangan yang saat ini dihadapi oleh industri tekstil di Kabupaten Bandung seperti penurunan daya saing, rendahnya produktivitas, dan ketergantungan bahan baku impor, menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk menanganinya secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis teori untuk mengatasi permasalahan ini.

Menurut (Mulgan, 2009) mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara

sistematis untuk mencapai tujuan. Strategi publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak. Strategi terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Public Strategy* dari (Mulgan, 2009) yang menekankan pengelolaan sektor publik melalui lima dimensi utama yang saling terkait, yaitu *purpose, environment, direction, action, dan learning*. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pengembangan industri tekstil, dengan menekankan keterpaduan antara perumusan tujuan, pemetaan lingkungan, penentuan arah kebijakan, implementasi tindakan, serta evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Dengan lima dimensi ini, teori *Public Strategy* dari (Mulgan, 2009) menawarkan kerangka kerja yang strategis, fleksibel, dan berbasis pembelajaran untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan sektor publik. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan dampak optimal. Peneliti merancang skema kerangka pemikiran berdasarkan variabel yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu:



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2024)